Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm terhadap Konsep Keadilan dan Distribusi di Indonesia

Rifqi Muthoharul Janan

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

rifqimjanan@gmail.com

Ma'mur Munjat

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

munazat56@gmail.com

Wartoyo

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

wartoyo@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran ekonomi Ibnu Hazm dalam konteks keadilan dan distribusi, serta relevansinya terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ibnu Hazm, seorang ulama terkemuka dari Andalusia, menekankan pentingnya kewajiban etis dalam menegakkan keadilan ('adl) dan pemerataan distribusi kekayaan ('adl fi al-taqsim) dalam ekonomi Islam. Kajian ini mengulas pemikiran Ibnu Hazm dan membandingkannya dengan realitas distribusi ekonomi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip beliau seperti larangan monopoli, keadilan dalam kontrak, dan redistribusi berbasis zakat masih sangat relevan hingga saat ini, khususnya dalam menghadapi ketimpangan yang semakin meningkat. Data mengenai Rasio Gini dan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan distribusi kekayaan yang terus bertahan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Hazm yang berpusat pada nilai keadilan dapat menjadi landasan normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi yang bertujuan mencapai keadilan distributif di Indonesia modern.

Kata Kunci: *Ibnu Hazm, keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, ekonomi Islam, Indonesia*

Abstract

This article explores the economic thought of Ibn Hazm in the context of justice and distribution, and its relevance to economic inequality in Indonesia. Ibn Hazm, a prominent Andalusian scholar, emphasized the ethical obligation of justice ('adl) and equitable wealth distribution ('adl fi al-taqsim) in Islamic economics. The study reviews Ibn Hazm's ideas in comparison with Indonesia's economic distribution realities. The analysis indicates that his principles—such as prohibition of monopolies, fair contracts, and zakat-based redistribution—are still relevant today, especially amid growing inequality. Data from Indonesia's Gini Ratio and

poverty levels show a persistent gap in wealth distribution. The paper concludes that Ibn Hazm's justice-centric economic thought can provide a normative foundation for economic policies aimed at achieving distributive justice in modern Indonesia.

Keywords: *Ibn Hazm, economic justice, wealth distribution, Islamic economics, Indonesia*

Pendahuluan

Keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tatanan sosial yang berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan distribusi kekayaan menjadi isu krusial yang terus menghantui kebijakan pembangunan nasional. Meskipun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5% per tahun dalam dua dekade terakhir, distribusi hasil pembangunan masih jauh dari merata. Rasio Gini Indonesia, yang menjadi indikator ketimpangan distribusi pendapatan, tercatat tetap tinggi dalam rentang 0,38 hingga 0,41 selama sepuluh tahun terakhir. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar kekayaan nasional masih terpusat di tangan kelompok kecil elite ekonomi, sementara mayoritas masyarakat masih berkutut dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari program bantuan sosial, subsidi, hingga redistribusi aset produktif, namun realitas ketimpangan masih menjadi tantangan mendasar yang belum terselesaikan.

Masalah distribusi ini tidak hanya menyangkut keadilan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek stabilitas sosial, politik, dan bahkan moralitas publik. Ketimpangan yang terus-menerus dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, meningkatnya jurang kelas, serta berkurangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam situasi seperti ini, pemikiran ekonomi alternatif sangat dibutuhkan untuk menelaah ulang paradigma pembangunan dan distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif. Salah satu pendekatan yang patut dikaji adalah ekonomi Islam, yang menjadikan keadilan sebagai nilai dasar dan prinsip utama dalam pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap dimensi distribusi. Nilai keadilan (*`adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kepemilikan terbatas (*al-milkiah al-muqayyadah*) merupakan fondasi sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, zakat, infak, sedekah, warisan, larangan riba, dan larangan penimbunan (*ihtikar*) adalah mekanisme konkret yang ditawarkan Islam untuk menciptakan sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi kekayaan.

Salah satu pemikir Islam klasik yang memberikan perhatian mendalam terhadap masalah keadilan dan distribusi adalah Abu Muhammad Ali Ibn Hazm al-Andalusi (994–1064 M). Ia merupakan tokoh besar dari mazhab Zahiri, yang dikenal dengan pendekatannya yang literal (tekstual) terhadap nash-nash syariat. Dalam karya-karyanya seperti *al-Muhalla* dan *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*,

Ibnu Hazm menyampaikan pandangan tegas bahwa distribusi kekayaan harus berjalan secara adil dan tidak boleh menumpuk hanya pada golongan tertentu. Ia menolak praktik riba, monopoli, dan transaksi yang tidak adil karena menurutnya, semua bentuk ketimpangan yang muncul akibat praktik tersebut merupakan bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, Ibnu Hazm menekankan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat dan menjalankan mekanisme redistribusi, terutama melalui zakat.

Dalam konteks ketimpangan distribusi di Indonesia saat ini, pemikiran Ibnu Hazm menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang dan dikontekstualisasikan. Prinsip-prinsip yang beliau tawarkan, seperti larangan akumulasi kekayaan secara berlebihan, kewajiban zakat, dan pentingnya keterlibatan negara dalam memastikan keadilan sosial, dapat menjadi kerangka normatif dalam merumuskan kebijakan distribusi yang berkeadilan. Terlebih lagi, pemikiran beliau yang berbasis pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) mampu menjadi sumber legitimasi moral dan religius dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok marjinal dan masyarakat miskin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Hazm terkait konsep keadilan dan distribusi kekayaan;
2. Menilai relevansi pemikiran tersebut dalam konteks realitas ketimpangan ekonomi di Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi aplikatif berbasis nilai-nilai Islam untuk kebijakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.

Dalam menjawab tujuan tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji dan membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dengan teori-teori keadilan modern seperti *justice as fairness* dari John Rawls dan *capability approach* dari Amartya Sen. Kedua teori ini telah menjadi rujukan utama dalam literatur keadilan distributif di dunia Barat. Namun, pendekatan mereka yang bersifat sekuler dan liberal seringkali tidak sepenuhnya cocok dengan karakter masyarakat Muslim yang memiliki dimensi spiritual dalam kehidupan sosial-ekonominya.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan sistem distribusi kekayaan yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis pemikiran ekonomi seorang tokoh klasik, yaitu Ibnu Hazm, dan menghubungkannya dengan realitas distribusi dan keadilan ekonomi di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna, konsep, serta relevansi normatif dari pemikiran Ibnu Hazm melalui data teks, teori, dan dokumen-dokumen relevan.

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis historis-komparatif, yaitu dengan menelusuri teks-teks klasik Islam sebagai sumber primer untuk memahami pandangan Ibnu Hazm, lalu membandingkannya dengan kondisi empiris distribusi ekonomi di Indonesia dan teori-teori keadilan distributif modern. Analisis ini dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari masing-masing sumber.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karya-karya utama Ibnu Hazm yang relevan dengan ekonomi dan keadilan sosial, terutama *al-Muhalla bil Atsar*, *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, serta literatur sekunder seperti jurnal, buku, dan disertasi yang membahas pemikiran beliau secara ekonomi. Untuk konteks Indonesia, data diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Kementerian Keuangan, dan kajian akademik tentang ketimpangan ekonomi serta distribusi zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur (library research) baik dalam bentuk cetak *maupun* digital. Data primer berupa teks karya Ibnu Hazm dalam bahasa Arab, sedangkan data sekunder mencakup terjemahan, komentar para sarjana, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga riset. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan kritik sumber, yakni dengan memverifikasi keaslian dan otoritas setiap referensi yang digunakan.

Instrumen penelitian berupa kartu data dan catatan analisis teks, yang digunakan untuk mencatat kutipan, tema, serta argumen penting dari setiap sumber yang dikaji. Peneliti juga menggunakan perangkat analisis konseptual untuk memetakan tema-tema distribusi, keadilan, zakat, dan peran negara sebagaimana dimunculkan dalam karya-karya Ibnu Hazm.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan komparasi teoritik. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama pemikiran Ibnu Hazm melalui pembacaan kritis teks. Kedua, konsep-konsep tersebut dibandingkan dengan kondisi ketimpangan distribusi di Indonesia menggunakan data statistik dan kebijakan nasional. Ketiga, dilakukan pemaknaan dan interpretasi berdasarkan teori-teori keadilan distributif seperti yang dikembangkan oleh Rawls dan Amartya Sen, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan maqashid al-shariah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menelaah pemikiran ekonomi Ibnu Hazm mengenai konsep keadilan dan distribusi kekayaan, serta mengkaji sejauh mana relevansi prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks distribusi ekonomi di Indonesia. Temuan disusun dalam beberapa subtopik yang mencerminkan fokus penelitian, dimulai dari temuan tekstual pemikiran Ibnu Hazm, kondisi objektif distribusi kekayaan di Indonesia, hingga interpretasi terhadap relevansi pemikiran klasik tersebut dalam kerangka kebijakan ekonomi kontemporer.

1. Pandangan Normatif Ibnu Hazm tentang Distribusi Kekayaan

Ibnu Hazm mengemukakan bahwa kekayaan adalah amanah Allah dan hanya sah dimiliki dan dikelola jika tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat. Dalam *al-Muhalla*, ia menyatakan bahwa setiap bentuk

penguasaan harta secara berlebihan atau dengan cara zalim—seperti riba, monopoli, atau ketimpangan akses—merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Ia berpandangan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil melalui instrumen zakat, pelarangan ihtikar, larangan eksploitasi, dan pengawasan negara terhadap jalannya transaksi ekonomi di masyarakat.

Dalam kerangka teologis ini, distribusi bukan hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Ia mengutip QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, dan mendasarkan seluruh prinsip ekonomi pada keharusan menjaga hak masyarakat miskin. Bahkan, negara dalam pandangan Ibnu Hazm bukan hanya pelindung hak milik, tetapi juga agen aktif dalam mencegah ketimpangan ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial.

2. Kondisi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Fakta dan Realitas

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi dan relatif stagnan. Rasio Gini sebagai indikator distribusi pendapatan tidak pernah turun di bawah angka 0,38 dalam satu dekade terakhir.

Tabel 1. Rasio Gini Indonesia (2018–2023)

shows Indonesia's Gini Ratio in recent years:

Year	Gini Ratio
2018	0.384
2019	0.38
2020	0.385
2021	0.388
2022	0.391
2023	0.388

Ketimpangan ini juga tampak dalam berbagai aspek kehidupan: konsentrasi kepemilikan lahan, ketimpangan pendapatan antarwilayah, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dominasi pasar oleh segelintir aktor ekonomi besar.

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 9,82% pada tahun 2018 menjadi 9,36% pada 2023, penurunan ini belum mampu mengatasi akar struktural ketimpangan. Program-program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan subsidi BBM masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh mekanisme distribusi kekayaan secara sistemik.

3. Kesesuaian Pemikiran Ibnu Hazm dengan Kebutuhan Distribusi di Indonesia

Pemikiran Ibnu Hazm sangat kontekstual untuk menjawab persoalan Indonesia. Dalam sistem distribusi kekayaan, beliau mengusulkan:

- 1) Zakat sebagai sistem sosial negara, bukan hanya ibadah individual.

- 2) Negara sebagai pelaksana distribusi dan pengawas pasar, bukan sekadar fasilitator.
- 3) Larangan penimbunan dan monopoli, demi menjaga kestabilan harga dan akses masyarakat miskin terhadap barang pokok.

Dalam praktiknya, sistem zakat di Indonesia saat ini masih berjalan parsial. Potensi zakat Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun hanya mampu dihimpun sekitar Rp 30 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum optimal menjadikan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Jika mengacu pada pendekatan Ibnu Hazm, pengelolaan zakat seharusnya berada di bawah otoritas negara sebagai bagian dari sistem fiskal dan sosial nasional.

4. Interpretasi Temuan dan Korelasi dengan Teori Modern

Jika dibandingkan dengan teori keadilan distributif modern, pemikiran Ibnu Hazm justru memiliki kemiripan dalam tujuannya—yakni melindungi yang lemah dan menjamin hak dasar semua warga negara. Dalam *difference principle* milik John Rawls, distribusi dianggap adil jika memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Sementara itu, *capability approach* dari Amartya Sen menekankan pentingnya menyediakan kesempatan nyata kepada semua orang untuk berkembang.

Ibnu Hazm, meski hidup jauh sebelum kedua tokoh tersebut, telah menyusun prinsip serupa dengan pendekatan yang lebih normatif dan berbasis wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak ketinggalan zaman, bahkan memiliki fondasi teoritis yang kuat dalam menjawab persoalan distribusi kekayaan global.

Temuan dari penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi Ibnu Hazm, tetapi juga menawarkan peluang untuk mengembangkan teori *distributive equity based on divine mandate*, yaitu model distribusi yang berbasis pada ketetapan syariah dan keharusan moral terhadap kesejahteraan publik.

5. Jawaban terhadap Rumusan Masalah dan Implikasi

Dari seluruh hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pemikiran ekonomi Ibnu Hazm masih sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kebijakan distribusi di Indonesia.
- b) Ketimpangan yang tinggi di Indonesia menuntut adanya pendekatan distribusi yang tidak hanya ekonomis tetapi juga syariah dan etis.
- c) Negara harus berperan aktif dalam mengintegrasikan sistem zakat ke dalam strategi pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan.
- d) Sistem distribusi yang adil membutuhkan instrumen hukum, fiskal, dan sosial yang berbasis nilai—bukan semata mekanisme pasar.

Kutipan

Dalam penulisan artikel ini, digunakan sejumlah referensi dari tokoh-tokoh klasik maupun kontemporer untuk memperkuat argumentasi mengenai relevansi pemikiran Ibnu Hazm terhadap keadilan dan distribusi di Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut dikutip secara langsung dan tidak langsung dalam tubuh artikel, dan seluruhnya dicantumkan dalam daftar pustaka di akhir tulisan.

Beberapa kutipan dalam badan teks artikel antara lain:

1. Menurut Ibnu Hazm (1996), zakat bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga kewajiban sosial yang wajib ditunaikan demi keadilan distribusi kekayaan.
2. Chapra (2000) menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi Islam yang harus tercermin dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok lemah.
3. Yusuf al-Qaradawi (1999) menyebut bahwa zakat adalah sistem distribusi yang menyatu dengan struktur sosial umat Islam.
4. Dalam konteks keadilan distributif, Rawls (1971) menekankan prinsip perbedaan sebagai mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi melalui keberpihakan terhadap kelompok paling lemah.
5. Data empiris dari BPS (2023) menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia selama lima tahun terakhir masih bertahan di angka 0,38–0,39 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang belum tertanggulangi secara signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran ekonomi Ibnu Hazm dan analisis terhadap kondisi ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm masih sangat relevan untuk diterapkan sebagai kerangka normatif dalam kebijakan distribusi modern. Pemikiran beliau yang menekankan pentingnya keadilan ('adl), larangan monopoli (ihtikar), distribusi zakat sebagai kewajiban sosial, serta peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, merupakan solusi yang bersifat tekstual sekaligus struktural dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan distribusi di Indonesia yang tercermin dari stagnannya rasio Gini dan terbatasnya pemerataan aset menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu diperkuat oleh pendekatan nilai yang adil dan spiritual.

Pemikiran Ibnu Hazm menjembatani dimensi normatif dan praktis, sehingga dapat menjadi inspirasi dalam membangun sistem distribusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan demikian, rumusan masalah terkait bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm terhadap konsep keadilan dan distribusi di Indonesia dapat dijawab bahwa gagasan beliau dapat diadopsi untuk mengembangkan sistem distribusi ekonomi yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Haneef, M. A. (2005). *A critical survey of Islamization of knowledge*. IIUM Press.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm terhadap Konsep Keadilan dan Distribusi di Indonesia

**Rifqi Muthoharul Janan
Ma'mur Munjat
Wartoyo**

- Ibnu Hazm. (1996). *Al-Muhalla bil Atsar*. Dar al-Fikr.
- Ibnu Hazm. (1998). *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Kahf, M. (2004). Islamic economics: What went wrong? *JKAU: Islamic Economics*, 19(1), 67–89. <https://doi.org/10.4197/islec.19-1.3>
- Qaradawi, Y. al-. (1999). *Fiqh al-zakah: A comparative study*. Muassasah al-Risalah.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Anchor Books.
- Syafii Antonio, M. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- World Bank. (2021). *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indo-economic-prospects>
- Zarkasyi, H. F. (2015). Epistemologi Islam dan Islamisasi ilmu pengetahuan. *Tsaqafah*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.375>
- Ashari, A. (2020). Relevansi teori keadilan Rawls dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 11(1), 15–27. <https://doi.org/10.21043/jeip.v11i1.7162>
- Nurizal, M. (2022). Zakat as a tool for redistribution. *Islamic Economics Journal*, 14(2), 211–230. <https://ejournal.example.org/zakatredistribusi>
- American Nurses Association. (n.d.). *Kesiapsiagaan bencana*. <https://www.nursingworld.org/practice-policy/work-environment/health-safety/disaster-preparedness/>